

## Matrik Program RPJM Kota Surakarta Tahun 2005-2010

No kode PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK	SKPD	FUNGSI
<b>AGENDA PENCIPTAAN IKLIM KEHIDUPAN KOTA YANG KONDUSIF, AMAN DAN DAMAI</b>			
<b>SASARAN I :</b>			
<b>Meningkatnya kesadaran individu maupun, kelompok masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat kota</b>			
I.1.1	<b>PROGRAM PERKUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI MASYARAKAT</b>	1. Kesbanglinmas	Ketertiban dan Keamanan
	1. Fasilitasi upaya penguatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat/ golongan;		
	2. Fasilitasi berbagai forum masyarakat dalam mengembangkan wacana social, politik dan ekonomi dalam meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penciptaan iklim kehidupan kota yang kondusif aman dan damai;		
	3. Mendorong tumbuhnya organisasi kemasyarakatan yang independen dan otonom dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan;		
	4. Pemberdayaan dan pemberian peluang kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi di dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap proses dan implementasi kebijakan publik		
I.1.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN MEDIASI PUBLIK</b>	1. BIK 2. Kesbanglinmas 3. Hukum & HAM	Ketertiban dan Keamanan
	1. Mendorong terlaksananya pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat;		
	2. Peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat sebagai upaya sosialisasi dan pengembangan wacana kemasyarakatan;		
	3. Peningkatan profesionalisme aparatur dan kelembagaan pemerintah di dalam melakukan koordinasi dan mediasi sebagai upaya preventif dan solusi atas berbagai permasalahan kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.		
I.1.3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	Kesbanglinmas, DKRPP, Bapeda	Ketertiban dan Keamanan
	1. Mendorong dan memberikan fasilitasi tumbuhnya dan peningkatan berbagai inisiasi untuk mendukung peningkatan harmonisasi antar kelompok masyarakat.		
	2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan berbagai aspirasi melalui peran aktifnya di berbagai media partisipasi dalam pembangunan		
	3. Meningkatkan kepedulian kelompok masyarakat dalam ikut menanggulangi berbagai permasalahan sosial, ekonomi maupun politik		
I.2.1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA</b>	Din. Pariwisata, Dikpora, Arsip dan Perpustakaan daerah	Pariwisata dan Budaya
	1. Penyediaan berbagai fasilitas untuk tumbuh dan berkembangnya kebudayaan		
	2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya media dalam mendukung pengembangan berbagai unsur budaya		

	3. Mengembangkan ajang kompetisi berbagai karya seni budaya		
I.2.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKTUALISASI NILAI NILAI LUHUR BUDAYA</b>	Dinas Pariwisata,Dikpora,DTK	Pariwisata dan Budaya
	1. Mengembangkan berbagai aturan penerapan seni dan arsitektur sebagai ciri Surakarta sebagai kota budaya		
	2. Melakukan penggalian (penelitian dan pengembangan) nilai-nilai budaya jawa		
	3. Mengkampanyekan penerapan tata nilai budaya melalui berbagai media informasi / komunikasi		
<b>SASARAN II</b>			
<b>Meningkatnya keamanan dan ketertiban kota</b>			
I.3.1	<b>PROGRAM PENINGKATAN SINERGI ANTARA APARAT DAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	Satpol PP, Kesbanglinmas, DKRPP, PMK	Ketertiban dan Keamanan
	1. Fasilitasi dan Perkuatan kelembagaan pertahanan sipil/linmas		
	2. Fasilitasi dan perkuatan kelembagaan satuan tugas-satuan tugas organisasi kemasayarakatan dalam meningkatkan pertisipasinya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat		
	3. Peningkatan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban termasuk bencana alam		
I.3.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM Mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban</b>	Satpol PP,Kesbanglinmas,PKL	Ketertiban dan Keamanan
	1. Mengembangkan gerakan disiplin masyarakat kota		
	2. Mengembangkan Mediasi masyarakat yang mendorong tumbuhnya wacana dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat kota		
	3. Mengembangkan mekanisme terapi dalam mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban		
	4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban		
I.4.1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HUKUM</b>	Hukum & HAM	Ketertiban dan Keamanan
	1. Peninjauan kembali berbagai peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan		
	2. Mengembangkan berbagai peraturan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat penyelenggaraan pembangunan		
	3. Sosialisasi berbagai produk hukum kepada masyarakat		
	4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum serta mengembangkan sistem informasi hukum.		

<b>AGENDA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS</b>			
<b>SASARAN I</b>			
<b>Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pembangunan</b>			
II.1.1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN</b>	Bapeda	Ketertiban dan Keamanan
	1. penyelenggaraan musyawarah pembangunan mulai dari tingkat kelurahan samapai ke tingkat kota		
	2. peningkatan SDM dalam mendukung peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
	3. menyempurnakan system dan mekanisme penyusunan kegiatan pembangunan melalui mekanisme partisipatif		
	4. mengembangkan kerangka regulasi yang mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan		
II.2.1	<b>PROGRAM PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA</b>	Organisasi,BKD, Pemerintahan-OTDA, Bawasda,	Pelayanan Umum
	1. Peningkatan pengawasan dan akutabilitas aparatur pemerintahan		
	2. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan		
	3. Pengelolaan sumber daya aparatur		
	4. Peningkatan kualitas aparatur Pemerintah		
	5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
	6. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Otonomi Daerah		
II.2.2	<b>PROGRAM PENINGKATKAN KUALITAS MENEJEMEN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Capil	Pelayanan Umum
	1. Penaganan Informasi, Proyeksi dan Perkembangan Penduduk		
	2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		
	3. Meningkatkan Pengelolaan Dokumen dan Penyuluhan Kependudukan		
	4. Meningkatkan Pelayanan Sistem Pencatatan Sipil		
	5. Meningkatkan pelayanan transmigrasi		
II.2.3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG EFISIEN EFEKTIF TRANSPARAN DAN AKUNTABEL</b>	Keuangan, Dipenda	Pelayanan Umum
	1. Meningkatkan kualitas Menejemen dan system informasi Keuangan Daerah		
	2. Meningkatkan kualitas SDM di bidang keuangan daerah		
	3. Meningkatkan Pengelolaan Sumber – sumber Pendapatan dan pembiayaan Daerah		
	4. Mengembangkan Infrastruktur Keuangan Daerah		
<b>SASARAN II</b>			
<b>Mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembangunan</b>			
II.3.1	<b>PROGRAM PENINJAUAN DAN PENATAAN KEMBALI TATA RUANG KOTA</b>	DTK,Bapeda, DPU, KLH	Lingkungan Hidup
	1. Melakukan identifikasi perkembangan pemanfaatan tata ruang dan pertanahan di kota Surakarta		
	2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan tata ruang dan pertanahan untuk mengetahui sejauhmana penyimpangan yang terjadi dan merumuskan kembali maksud, tujuan dan sasaran penyusunan review tata ruang		
	3. Melakukan pengkajian berkaitan dengan kebutuhan ruang di dalam mengantisipasi berbagai perkembangan kota serta perkembangan kebutuhan dan tingkat pelayanan yang diperlukan agar terjamin kenyamanan dan keserasian pemanfaatan ruang dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan/pelestarian lingkungan		

	4. menyusun kembali rencana umum dan detail tata ruang kota		
II.4.1	<b>PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM</b>	Satpol PP,Hukum dan HAM, Kesbanglinmas, Bawasda	Keamanan dan ketertiban
	1. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap segala macam tindak penyalahgunaan dan pelanggaran hukum dan HAM		
	2. Peningkatan rasa aman masyarakat dari segala macam tidan kejahatan termasuk penyalahgunaan obat-obat terlarang		
	3. Meningkatkan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum yang melakukan fungsi penegakkan hukum dan HAM		
	4. Peningkatan penghormatan dan persamaan setiap warga masyarakat di depan hukum, serta mendorong keteladanan setiap pimpinan dilingkungan masyarakat termasuk pimpinan pemerintahan untuk mentaati hukum dan HAM		
	5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam menjamin efektivitas penegakkan hukum dan HAM		
	6. Peningkatan pengawasan baik melalui institusi formal maupun masyarakat atas setiap penyelenggaraan pemerintahan		
II.5.1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK</b>	Organisasi,BKD,Bapeda, PMK Bag. Umum	Pelayanan Umum
	1. Mengembangkan kelembagaan, manajemen dan sistem pelayanan one day services (ODS), one stop services (OSS)		
	2. meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur / sarana prasarana pelayanan publik		
	3. mengembangkan Standar mutu pelayanan		
	<b>SASARAN III</b>		
	<b>Mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah pengembangan</b>		
II.6.1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH SURAKARTA BAGIAN UTARA</b>	Bapeda, DPU,DLLAJ, DKP,Disperindag, kop, PDAM,DKRPP	Ekonomi
	1. Peningkatan investasi dibidang Industri, perdagangan dan jasa		
	2. Peningkatan pelayanan dibidang investasi khususnya untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah utara		
	3. Peningkatan kualitas pembinaan UKMK, serta pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga		
	4. Peningkatan sinergi pengembangan dengan kawasan tumbuh diwilayah kabutaten lain untuk meningkatkan multiplier yang mampu mempercepat pengembangan kawasan		
II.6.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH SURAKARTA BAGIAN UTARA</b>	Bapeda, DPU,DLLAJ, DKP, PDAM	Ekonomi
	1. Peningkatan kualitas infrastruktur transporasi termasuk pengembangan terminal Type C, komunikasi, kelistrikan, drainase dan penyediaan air bersih		
	2. Pemeliharaan dan peningkatas akses dari wilayah-wilayah pemukiman kepada jalan-jalan utara		
	3. Peningkatan sanitasi (IPAL) dan penyehatan lingkungan hdup		
	4. Melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan lingkungan		
	5. Peningkatan / pengembangan sarana perekonomian yang lain seperti pengembangan pasar tradisonal, pergudangan dan pangkalan bongkar muat		

II.6.3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS</b>	Bapeda, Disperindag, Kop, Tata Kota, DPU	Ekonomi
	1. Pengembangan Kawasan sentra industri, perdagangan, jasa		
	2. Pengembangan Kawasan perbatasan potensial		
<b>AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
<b>SASARAN I</b>			
<b>Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat</b>			
III.1.1	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ATAS PANGAN BAGI MASYARAKAT MISKIN</b>	DKRPP, Dipertan	Perlindungan Sosial
	1. Pemenuhan hak atas pangan bagi keluarga miskin dan orang-orang terlantar		
	2. Fasilitasi dan Pengembangan kelembagaan sosial masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pangan		
III.1.2	<b>PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN</b>	DKK	Kesehatan
	1. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi keluarga miskin dan orang-orang terlantar		
	2. Fasilitasi dan Pengembangan kelembagaan sosial masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan		
III.1.3	<b>PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN</b>	Dispora, DKRPP	Pendidikan
	1. Pemenuhan hak atas pendidikan bagi keluarga miskin dan orang-orang terlantar		
	2. Fasilitasi dan Pengembangan kelembagaan sosial masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan		
III.1.4	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN BERUSAHA BAGI MASYARAKAT MISKIN</b>	Disnaker, Dispenduk Capil, DKRPP	Ekonomi
	1. Peningkatan ketrampilan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesempatan atas pekerjaan dan berusaha		
	2. Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan sosial masyarakat dalam mendukung kesempatan bekerja / berusaha bagi keluarga miskin		
III.1.5	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN DAN SUMBER AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT MISKIN</b>	PDAM, DPU, DKC, DKK, DKRPP	Perumahan dan Fasilitas Umum
	1. Pengembangan upaya pemenuhan atas perumahan bagi keluarga miskin		
	2. Pemenuhan atas pelayanan atas sanitasi dan sumber air bersih bagi keluarga miskin		
	3. Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan sosial masyarakat dalam mendukung ketersediaan perumahan dan penyediaan sumber air bersih		
III.1.6	<b>PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN BAGI MASYARAKAT MISKIN</b>		Perlindungan sosial
	1. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		
	2. Pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan sosial		
	3. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial (PMKS)		
	4. Pengembangan system perlindungan sosial		
	5. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan		
	6. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak		
III.2.1	<b>PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI</b>	Bapeda, Disperindag, Koperasi	Ekonomi
	1. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan investasi		
	2. Kajian dan Pengembangan kebijakan investasi ekonomi kota		

III.2.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	Bapeda, Disperindag, Koperasi	Ekonomi
	1. Pengembangan kelembagaan promosi dan kerjasama investasi		
	2. Inventarisasi potensi ekonomi untuk kerjasama investasi		
III.2.3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK EKSPOR</b>	Disperindag, Koperasi	Ekonomi
	1. Pemenuhan standar kualitas bagi produk ekspor		
	2. Peningkatan SDM UKM dalam bidang ekspor / import		
	3. Fasilitasi dan peningkatan pelayanan dalam mendorong peningkatan daya saing ekspor		
III.2.4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA</b>	Bapeda, Disperindag, Koperasi.	Ekonomi
	Pengembangan kemitraan usaha antara UKM dan Usaha besar		
	Advokasi dan Fasilitasi HAKI bagi UKM		
III.3.1	<b>PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA</b>	Disnaker	Ekonomi
	1. mendorong tumbuhnya sector-sector ekonomi (perdagangan, industri, jasa) yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja		
	2. mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra-sentra industri kecil dan menengah yang mampu menyerap banyak tenaga kerja		
	3. Pengembangan system informasi tenaga kerja sebagai sarana mediasi antara dunia kerja dengan tenagakerja		
	4. Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan		
	5. Peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan		
III.3.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGAKERJA</b>	Disnaker, Dispora	Ekonomi
	1. Peningkatan kerjasama antara lembaga pendidikan formal, lembaga pelatihan kerja/ pofesi dan unit pengembangan tenaga kerja di tempat kerja dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sebagai satu kesatuan system pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu		
	2. Penyelenggaraan program-program pelatihan berbasis kompetensi		
	3. Mendorong dan memberikan kesempatan seluas luasnya kepada tenaga kerja untuk mengikuti uji kompetensi / sertifikasi profesi		
	4. Peningkatan kualitas kelembagaan dan instruktur pendidikan dan latihan kerja		
III.3.3	<b>PENINGKATAN KUALITAS HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>	Disnaker, Perindag	Ekonomi
	1. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar dalam tata hubungan industrial sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. (UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial)		
	2. Peningkatan kapasitas kelembagaan ketenagakerjaan		
	3. Peningkatan Perlindungan terhadap hak-hak semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak-anak dan wanita		
	4. Peningkatan / pemberian jaminan social / jaminan keselamatan dan kesehatan kerja		
III.4.1	<b>PROGRAN ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF BAGI KOPERASI DAN UKM</b>	Bapeda, Disperindag, Koperasi	Ekonomi
	1. Melakukan Advokasi kepada Koperasi dan UMKM atas berbagai peraturan yang kurang mendukung atau menghambat perkembangannya		
	2. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha		
	3. Peningkatan kelancaran arus barang baik bahan baku maupun produk dan jasa yang diperlukan; seperti kemudahan perdagangan dan pengangkutan		
	4. Peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan dan penilain kebijakan dan program		

	5. Pengembangan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk perijinan satu atap bagi UMKM		
	6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif dan para pelaku dan instansi terkait		
	7. Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasi		
III.4.2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM</b>	Bapeda, Disperindag, Koperasi	Ekonomi
	1. Fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap sumber daya produktif		
	2. Peningkatan peran serta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultasi usaha melalui penyediaan system insentif kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanan		
	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan lembaga keuangan mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam (KSP/ USP) antara lain memberikan kepastian status Badan Hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan system jaringan antar LKM dan antar LKM dengan Bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder		
	4. Perluasan akses sumber pembiayaan Koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi Koperasi dan UMKM, peningkatan perasn lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta perasn lembaga penjamin kredit koperasi dan UMKM		
	5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan UMKM baik yang bersumber dari pemerintah maupun BUMN		
	6. Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit (kesenjangan skala, formalisasi dan informasi) dalam pendanaan UMKM		
	7. Pengembangan system insentif, akreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembaga-lembagna pendukung		
	8. Revitalisasi unit unit pengembangan Koperasi dan UMKM		
	9. Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha / kemitraan usaham dan pengembangan system transaksi usaha yang bersifat online, terutama bagi komoditas unggulan daerah yang berdaya saing tinggi		
III.4.3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETETIF</b>	Disperindag, Koperasi, DPP	Ekonomi
	1. Pemasyarakatan Kewirausahaan, termasuk mempeluas pengenalan dan semangat kewirausahaan dalam pendidikan		
	2. Penyediaan insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UMKM berbasis IPTEK, khususnya UKM yang berorientasi ekspor		
	3. Penyediaan system insentif dan pembinaan kesedaran UKM tentang HAKI		
	4. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan		
	5. Falisitasi dan pemberian dukungan kemudahan untuk pengembangan incubator teknologi dan bisnis, termasuk pemanfaatan lembaga Litbang melalui system kemitraan		
	6. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan kemitraan investasi antar UKM, termasuk melalui aliansi strategis atau investasi bersama (joint investment) baik dengan perusahaan asing maupun nasional dalam mempercepat penguasaan teknologi dan pasar		
	7. Falisitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan UMKM dalam wadah koperasi		

	8. Pemberian dukungan serta kemudahan terhadap upaya peningkatan kualitas pengusaha kecil dan menengah termasuk wanita pengusaha menjadi wirausaha tangguh yang memiliki semangat kooperatif		
<b>III.4.4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO</b>	Koperasi,DKRPP,KLH	Ekonomi
	1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, lokasi usaha dan perlindungan usaha.		
	2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti system bagi hasil dari dana bergulir, system tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat sebagai pengganti anggunan		
	3. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber Pemerintah maupun BUMN yang lebih terkoornasi, profesional dan institusional		
	4. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM)		
	5. Penyelenggaraan pelatihan usaha dan kewirausahaan dan bimbingan teknis menejemen usaha		
	6. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha		
	7. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama diantara usaha mikro termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha		
	8. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dana pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi / klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai		
	9. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro / sector informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi di daerah / kantong kantong kemiskinan		
<b>III.4.5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAN KOPERASI</b>	Koperasi	Ekonomi
	1. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi yang sukses yang dikelola dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi		
	2. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi		
	3. Pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi		
	4. Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi menejemen koperasi primer maupun sekunder untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota		
	5. Pemberian dukungan kemudahan untuk mengembangkan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan, penyukuhan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pembiayaan, teknologi informasi, promosi dan pemasaran		
	6. Pengembangan system pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota pengelola koperasi, calon anggota dan kader koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koeprasi dalam kehidupan koperasi yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan tanggungjawab antara pemerintah dan gerakan koeprasi		
	7. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama antar koperasi		
	8. Meningkatkan kemampuan aparat dalam melakukan penilaian dampak, regulasi, kebijakan dan program pengembangan koperasi		
	9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakandan program pembangunan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait		

III.5.1	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMD</b>	Bapeda, Disperindag	Ekonomi
	1. Peningkatan peran pembina di dalam melaksanakan supervisi / pengawasan BUMD		
	2. Mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui peningkatan profesionalisme manajemen BUMD		
	3. Melakukan studi pengembangan BUMD		
III.6.1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK DALAM SISTEM PRODUKSI</b>	Disperindag, Bapeda	Ekonomi
	1. mengembangkan sistem informasi teknologi tepat guna dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas produk ukm		
	2. meningkatkan akses ukm terhadap berbagai informasi teknologi produksi		
	3. melakukan penelitian dan pengembangan iptek dalam mendukung peningkatan produk ukm		
	4. melakukan diseminasi teknologi tepat guna bagi peningkatan produk ukm		
III.6.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN IPTEK</b>	Bapeda	Ekonomi
	1. mengembangkan kelembagaan dalam mendukung koordinasi pengembangan dan penerapan iptek bagi UKM		
	2. meningkatkan koordinasi dalam rangka fasilitasi hak paten /HAKI		
	3. pengembangan sistem insentif dalam mendorong pengembangan iptek		
	4. Meningkatkan, membudayakan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bagi masyarakat		
	5. mendorong lahirnya lembaga-lembaga intermediasi di bidang penerapan teknologi yang mendukung pengembangan ukm		
	6. meningkatkan kompetensi penguasaan teknologi melalui pengembangan kelembagaan sertifikasi keahlian		
IV.7.1	<b>PROGRAM INVENTARISASI, IDENTIFIKASI DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASSET</b>	Aset Daerah, Bapeda, Hukum, Bag. Umum, Pemerintahan	Pelayanan Umum
	1. melakukan inventarisasi, identifikasi dan peningkatan status hukum		
	2. melakukan pengkajian status status hukum atas asset yang ada dalam rangka memperjelas penguasaan atas asset		
III.7.2	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASSET DAERAH</b>	Aset Daerah, Bapeda, Hukum, Bag. Umum, Pemerintahan	Pelayanan Umum
	1. melakukan koordinasi pengkajian potensi ekonomi asset dengan pihak terkait dan kemungkinan pemanfaatannya agar lebih memiliki nilai ekonomi yang tinggi		
	2. melakukan kerjasama pengelolaan asset dengan pihak lain dalam rangka pemanfaatan asset agar memberikan nilai tambah ekonomi, sosial dan pelayanan kepada masyarakat		
	3. melakukan pengamanan asset baik secara fisik maupun non fisik untuk melindungi dari penguasaan pihak lain secara tidak sah		
	4. melakukan upaya hukum dalam rangka pengamanan terhadap asset yang telah dikuasai pihak lain secara tidak sah		
III.7.3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA BASE ASSET DAERAH</b>	Aset Daerah, Bapeda, Hukum, Bag. Umum, Pemerintahan	Pelayanan Umum
	1. mengembangkan sistem informasi dan manajemen pengelolaan asset		
	2. melakukan penilaian atas asset daerah		
	3. meningkatkan kualitas SDM pengelola asset dalam rangka peningkatan kinerja		

<b>SASARAN II</b>			
<b>Peningkatan kaulitas manusia secara kelurahan (peningkatan indek IPM)</b>			
III.8.1	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	Dispora	Pendidikanm
	1. Peningkatan / Penyediaan sarana prasarana pendidikan melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada, dukungan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan biaya operasional pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)		
	2. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta partisan model-model pembelajaran PAUD , yang mengacu pada tahap tahap perkembangan anak , ilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni		
	3. peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan PAUD kepada orang tua, masyarkat sebagai upaya membantu tumbuh kembangnya jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan lebih lanjut		
	4. pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawaan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan demokratisasi.		
III.8.2	<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN</b>	Dispora	Pendidikan
	1. Peningkatan / penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas termasuk laboratorium, perpustakaan buku pelajaran dan paralatan peraga pendidikan yang didukung dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas / memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya		
	2. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi anak termasuk anak anak dari keluarga miskin dan dari wilayah yang relatif tertinggal		
	3. peningkatan upaya penarikan kembali anak-anak putus sekolah jenjang SD/ MI/ Paket A dan SMP/ MTs/ Paket B dan lulusan SD yang tidak melanjutkan ke dalam system pendidikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah (tanpa diskriminasi gender) melalui antara lain system pendidikan berbasis masyarakat, menyediakan bantuan biaya pendidikan baik dalam bentuk beasiswa atau voucher pendidikan		
	4. Penembangan kurikulum local yang disesuaikan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan , teknologi, budaya dan seni termasuk pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri serta kecakapan untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dan dasar-dasar kecakapan vokasi sesuai tuntutan masyarakat.		
	5. penyediaan materi, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekut guna meningkatkan pemahan perserta didik terhadp ilmu pengetahuan yang dipelajari		
	6. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa		
	7. Penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat		
	8. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan		
	9. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasardan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentinnya pendidikan dasar bagi anak anak baik laki-laki maupun perempuan		
	10. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring evaluasi dan pengawan		

	pelaksanaan pembangunan dasar sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan demokrasi		
III.8.3	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</b>	Dispora	Pendidikan
	1. Peningkatan / penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas termasuk termasuk laboratorium, perpustakaan buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan yang didukung dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas / memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya		
	2. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik melalui jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, penduduk dari keluarga miskin dan dari wilayah yang relatif tertinggal		
	3. Pengembangan kurikulum local yang disesuaikan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri serta kecakapan untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dan dasar-dasar kecakapan vokasi sesuai tuntutan masyarakat		
	4. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang didukung oleh upaya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri.		
	5. penyediaan materi, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekut guna meningkatkan pemahan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajari		
	6. Penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat		
	7. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan		
	8. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasardan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi anak anak baik laki-laki maupun perempuan		
	9. Pengembanan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring evaluasi dan pengawan pelaksanaan pembangunan dasar sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan demokrasi		
III.8.4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Perpustakaan	Pendidikan
	1. Perluasan / peningkatan peran dan fungsi perpustakaan		
	2. Pengembangan dan pembinaan perpustakaan		
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dan sistem informasi		
	4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya membaca		
	5. Fasilitasi pengembangan berbagai karya dan kreasi ilmiah, sastra dan seni.		
III.9.1	<b>PROGRAM PENINGKATAN MENEJEMEN PELAYANAN KESEHATAN</b>	DKK	Kesehatan
	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi Pembangunan kesehatan		
	2. Pengembangan system informasi kesehatan termasuk didalamnya adalah pengembangan media promosi kesehatan, teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);		
	3. Pengembangan system kesehatan kota khususnya pengembangan keterpaduan pelayanan kesehatan;		
	4. Pengembangan dana jaminan kesehatan;		

III.9.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>	DKK	Kesehatan
	1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan		
	2. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan		
	3. Pembinaan tenaga kesehatan, termasuk pengembangan karier tenaga kesehatan		
	4. Pemenuhan standar kompetensi profesi kesehatan		
III.9.3	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN</b>	DKK	Kesehatan
	1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat terutama penduduk miskin melalui peningkatan peran puskesmas dan jaringannya		
	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu		
	3. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Anak		
	4. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		
	5. Pemenuhan Standart Kopetensi Sarana Kesehatan		
III.9.4	<b>PROGRAM PERBAIKAN GIZI</b>		Kesehatan
	1. Peningkatan status gizi keluarga terutama bagi ibu hamil, bayi dan balita	DKK	
	2. Penanggulangan gizi buruk), anemia gisi besi, GAKY, vitamin A, dan gizi mikro lainnya		
	3. Penanggulangan gizi lebih		
	4. Peningkatan surveilens gizi		
	5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga sadar gizi		
III.9.5	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT</b>	DKK, Dipertan	Kesehatan
	1. Pencegahan dan penanggulangan factor resiko		
	2. Peningkatan imunisasi		
	3. Penemuan dan tata laksana penderita		
	4. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah penyakit		
	5. Peningkatan KIE dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit		
	6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Zoonosa		
III.9.6	<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>	DKK	
	1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya		Kesehatan
	2. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat aditif (NAPZA)		
	3. Peningkatan pengawasan mutu, kasiat dan keamanan produk terapeutik/ obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan, dan produk kosmetika		
	4. Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan		
III.9.7	<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT</b>	DKK, PU, KLH	Kesehatan
	1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar		
	2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan		
	3. Pengembangan dampak resiko pencemaran lingkungan		
III.10.1	<b>PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>	1. DKRPP & KB, DKK	Pelayanan Umum
	1. Pengembangan kebijakan pelayanan Keluarga Berencana (KB), Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) dalam mendorong peran serta masyarakat tentang keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		
	2. Peningkatan akses dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi		
	3. Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan berjangka panjang yang lebih terjangkau		
	4. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya		
	5. Penyelenggaraan promosi dan pememuihan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi edukasi dan konseling		

III.10.2	<b>PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA</b>	1. DKRPP & KB,DKK	Kesehatan
	1. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan bagi remaja		
	2. Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan Bahaya NAPZA, termasuk Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja		
	3. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri		
III.10.3	<b>PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA</b>	DKRPP & KB, DKK	
	1. Pengembangan dan memantapkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga		Kesehatan
	2. Penyelenggaraan advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga		
	3. Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)		
	4. Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan /magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS		
	5. Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja dan lanjut usia		
III.10.4	<b>PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS</b>	DKRPP & KB,DKK	Kesehatan
	1. Pengembangan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam memperkuat kelembagaan keluarga kecil berkualitas		
	2. Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber KB		
	3. Pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro		
III.10.5	<b>PORGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN</b>	Dikpora	Kesehatan
	1. Pembinaan manajemen keolahragaan		
	2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga		
	3. Pembinaan kemitraan dan kewirausahaan untuk pengembangan industri olahraga		
	4. Peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga		
III.11.1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEAGAMAAN</b>		Agama
	1. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai nilai keagamaan	Kesbanglimas	
	2. Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan		
	3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama		
	4. Peningkatan dan pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan pendidikan keagamaan		
	5. Peningkatan kerukunan umat beragama		
III.12.1	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	DKRPP	Pelindungan sosial
	1. Pengembangan sistem dan informasi manajemen kesejahteraan sosial		
	2. Peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial		
	3. Pembinaan dan perlindungan sosial bagi PMKS		
	4. Perkuatan kelembagaan kesejahteraan sosial		
III.12.2	<b>PROGRAM ADVOKASI BAGI PMKS</b>	DKRPP	Perlindungan sosial
	1. Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang cacat		
	2. Perlindungan hukum dan HAM bagi PMKS		

<b>SASARAN III</b>			
<b>Pelestarian Lingkungan Hidup</b>			
III.13.1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	BaPEDA, KLH, DTK, DPU	Lingkungan Hidup
	1. Melakukan inventarisasi, evaluasi sumberdaya alam dan penyusunan neraca sumber daya alam,		
	2. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		
	3. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan hidup		
	4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pengelola lingkungan hidup		
	5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Hukum dan penegakan hukum lingkungan hidup		
III.13.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA</b>	DKP	Lingkungan Hidup
	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan kota		
	2. Meningkatkan kualitas fasilitas umum perkotaan		
III.13.3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN</b>	1. Bapeda 2. DTK	Lingkungan Hidup
	1. Mendirikan Lab SIG sebagai upaya penyusunan sistem informasi lingkungan dan akuntansi sumber daya alam (nature resources accounting);		
	2. Penyusunan status lingkungan hidup Daerah (SLHD);		
	3. Pendirian Pusat Informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang bersifat on line yang diakses oleh setiap pemangku kepentingan di bidang lingkungan		
III.14.1	<b>PROGRAM PENATAAN SISTEM, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN JALAN JEMBATAN</b>	DPU, BAPEDA	Ekonomi
	1. Penataan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan		
	2. Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
	3. Peningkatan Jalan dan Jembatan		
III.14.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN TRANSPORTASI PERKOTAAN</b>	DLLAJ, DPU	Ekonomi
	1. Peningkatan studi dan kajian sistem transportasi perkotaan		
	2. Peningkatan kualitas manajemen transportasi perkotaan		
	3. Peningkatan kualitas SDM dan sarana pendukung di bidang transportasi perkotaan		
III.14.3	<b>PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS PRASARANA, SARANA, KELANCARAN, KETERTIBAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DALAM Mendukung MOBILITAS MASYARAKAT</b>		
	1. Peningkatan prasarana dan sarana lalu lintas untuk mendukung pelayanan public pengguna jalan		
	2. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran perda		
	3. Pelaksanaan sosialisasi kesadaran tertib lalu lintas terhadap pengguna jalan		
	4. Peningkatan pelayanan uji kir kendaraan		
	5. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum		
	6. Peningkatan fasilitas parkir, pengawasan dan pengendalian parkir		

III.14.4	<b>PROGRAM PENINGKATAN BIDANG ENERGI, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>	LINTAS SKPD	Ekonomi
	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur energi, telekomunikasi dan informasi		
	2. Peningkatan koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang energi, Telekomunikasi dan informasi		
III.14.5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS INFRASTRUKUR PEMUKIMAN</b>	DKP, DPU, DTK	Ekonomi
	1. Perawatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur pemukiman & TPU.		
	2. Penyediaan perumahan/ pemukiman bagi masyarakat seperti pembangunan rumah susun untuk mengakomodasi pemukim-pemukim yang menempati infrastruktur kota.		
	3. Membudayakan konsep pemukiman sehat di lingkungan masyarakat perkotaan		
	4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kapasitas pemukiman		
III.14.6	<b>PROGRAM PENATAAN SISTEM, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN DRAINASE KOTA</b>	BAPEDA, DPU	Lingkungan hidup
	1. Penataan Sistem Jaringan Drainase		
	2. Operasional dan Pemeliharaan Drainase		
	3. Peningkatan Drainase		
<b>AGENDA PENINGKATAN EKSISTENSI KOTA DALAM TATA PERGAULAN REGIONAL, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL</b>			
<b>SASARAN I</b>			
<b>Meningkatkan kerjasama antara daerah</b>			
IV.1.1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR DAERAH</b>	Pemerintahan otda, KAD	Pelayanan Umum
	1. Melakukan fasilitasi kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan baik lokal, regional, nasional maupun internasional		
	2. Melakukan Koordinasi Identifikasi potensi dan kelemahan/keterbatasan sumber daya daerah SUBOSUKAWONOSRATEN dan menggalang kekuatan secara bersama		
	3. Melakukan Koordinasi dalam rangka pengembangan tata ruang bersama dan tanda batas wilayah administratif SUBOSUKAWONOSRATEN		
	4. Melakukan Koordinasi pengembangan image kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN		
	5. Peningkatan Koordinasi, pengembangan Kerjasama, jejaring dan kemitraan antar daerah		
IV.1.2	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI ANTAR DAERAH</b>	Bapeda,	Pelayanan Umum
	1. Melakukan fasilitasi kebijakan yang meliputi inovasi, difusi, unggulan daerah dan kapasitas masyarakat serta pengembangan wilayah kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN		
	2. Melakukan fasilitasi Peningkatan kapasitas / penguatan institusi penelitian dan pengembangan (litbang) daerah		
	3. Melakukan fasilitasi, sosialisasi pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan		
	4. Melakukan fasilitasi pengembangan IPTEK daerah SUBOSUKAWONOSRATEN		
IV.1.3	<b>PROGRAM KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH</b>	Bapeda	Pelayanan umum
	1. Mengembangkan daya saing dan daya tarik daerah melalui sistem inovasi dan kluster industri		
	2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di bidang kerjasama antar daerah		

	3. Penciptaan iklim yang kondusif dalam rangka pengembangan ekonomi regional melalui koordinasi pengembangan standar pelayanan bersama		
IV.2.1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN PERINTAHAN KOTA</b>	Organisasi	Pelayanan Umum
	1. melakukan restrukturisasi organisasi dan tatalaksana pemerintah kota		
	2. melakukan peningkatan kemampuan manajemen pemerintah kota yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi		
IV.2.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAPAN GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN BEBAS</b>	Disperindag, pem dan otda, BKD, Bapeda	Palayanan Umum
	1. melakukan advokasi terhadap berbagai peraturan yang berhubungan dengan globalisasi dan perdagangan bebas		
	2. melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kontek globalisasi dan perdagangan bebas		
	3. mendorong kesiapan masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi globalisasi dan perdangan bebas		
<b>SASARAN II</b>			
<b>Pengembangan image Surakarta kota Budaya</b>			
IV.3.1	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SURAKARTA KOTA BUDAYA</b>	Disparsenibud	Pariwisata dan Budaya
	1. Pengembangan masyarakat sadar budaya		
	2. Pengembangan paket paket promosi Surakarta kota budaya		
	3. Pengembangan berbagai regulasi yang mampu mengikat seluruh komponen masyarakat dalam menerapkan dan mengaplikasikan nilai-nilai dan ciri budaya		
	4. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung terwujudnya pembangunan Surakarta kota Budaya		

**WALIKOTA SURAKARTA**

**JOKO WIDODO**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.